

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan dunia yang memiliki banyak aspek meliputi kesulitan dalam mengakses ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kemampuan dasar seseorang, sehingga saat ini masih menjadi tantangan besar bagi kemajuan di banyak negara, termasuk Indonesia. Walaupun jumlah kemiskinan menurun, ketimpangan gender dalam hal kemiskinan masih sangat besar, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Data yang dikumpulkan oleh Bank Dunia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 9,2% atau hampir 700 juta penduduk dunia masih hidup dalam garis kemiskinan ekstrim, yang bertahan hidup dengan pendapatan kurang dari \$2,15 per hari (Joe Hasell and Pablo Arriagada, 2022). Angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2025 sebesar 8,47% (23,85 juta orang), menurun 0,10% (0,21 juta orang) terhadap September 2024 dan menurun 0,56% (1,37 juta orang) terhadap Maret 2024 (*Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 Turun Menjadi 8,47 Persen.*, 2025). Permasalahan kemiskinan yang kompleks menuntut pendekatan yang luas dan inklusif, terutama berlaku untuk kelompok rentan yang sering terpinggirkan dalam proses pembangunan.

Perempuan merupakan kelompok yang mengalami feminisasi kemiskinan, di mana tingkat kerentanannya jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki dalam menghadapi kondisi kemiskinan. Permasalahan yang dihadapi bukan sekedar jumlah pendapatan yang diperoleh, tetapi juga akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, kepemilikan harta, sampai pengambilan keputusan untuk diri sendiri, semua ketimpangan yang dihadapi perempuan semakin terpuruk dalam kemiskinan struktural. Pada tahun 2022 oleh UN Women, UNDP, dan Pardee Center for International Futures mengenai kemiskinan diperkirakan sebanyak 388 juta perempuan dan anak perempuan akan mengalami kemiskinan yang parah secara global, sedangkan jumlah laki-laki dan anak laki-laki adalah 372 juta namun situasinya bisa menjadi lebih buruk jika jumlah ini dapat meningkat menjadi 446

juta (sementara itu, laki-laki dan anak laki-laki bisa mencapai 427 juta). Di Negara Indonesia ini, dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang hanya mencapai 56,42 persen, jauh lebih rendah daripada tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki yang mencapai 84,66 persen jauh lebih tinggi (*Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2024, 2025*). Kondisi ini menjadi lebih buruk karena perempuan menghadapi beban ganda sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga, yang membuat upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan semakin sulit.

Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kabupaten Sleman, memiliki karakteristik unik dalam konteks kemiskinan dan pemberdayaan perempuan yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2024, kejadian kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebesar 11,35%, merupakan tingkat tertinggi di Pulau Jawa, dengan proporsi yang signifikan dari kontributor kemiskinan ini berasal dari rumah tangga yang dipimpin oleh kepala keluarga perempuan. Meskipun Kabupaten Sleman memiliki reputasi sebagai daerah dengan standar pendidikan dan infrastruktur yang relatif maju di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman terus mengatasi dengan berbagai tantangan yang terkait dengan kemiskinan. Yang menarik, dari jumlah penduduk miskin tersebut, sebagian besar adalah perempuan yang berada dalam kondisi rawan sosial ekonomi, termasuk perempuan kepala keluarga, perempuan lanjut usia tanpa perlindungan sosial, dan perempuan dengan tingkat pendidikan rendah. Kondisi geografis Kabupaten Sleman yang terdiri dari dataran rendah hingga lereng Gunung Merapi juga menciptakan perbedaan karakteristik kemiskinan dan tantangan pemberdayaan yang beragam di setiap wilayah.

Gambar 1. 1 Presentasi Penduduk Miskin

Sumber: BPS DIY



Berdasarkan data presentasi penduduk miskin dari tahun 2021-2025, dapat dilihat dengan adanya penurunan yang cukup signifikan. Di tahun 2021, presentasi penduduk miskin mencapai angka 8,46%, lalu mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan angka 7,74%, dan terus mengalami penurunan yang cukup bagus hingga mencapai 6,75% pada tahun 2025 (*Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sleman, 2025*). Penurunan angka kemiskinan ini, menggambarkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat, termasuk perempuan rawan sosial ekonomi. Meskipun, adanya penurunan angka kemiskinan masih cukup tinggi menunjukkan bahwa pola tersebut menunjukkan perlunya penguatan strategi pemberdayaan perempuan dalam program yang fokus pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan mereka sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini memilih Kabupaten Sleman sebagai studi kasus yang relevan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan strategi pemberdayaan perempuan dalam program perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE).

Untuk mengatasi kemiskinan program perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE), salah satu intervensi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sleman, berfokus pada pemberdayaan perempuan. Program ini dimulai dengan pemahaman bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan keluarga dan masyarakat, dan bahwa pemberdayaan mereka dapat memiliki efek multiplier yang lebih besar. Dinas Sosial Sleman mencatat bahwa Program Pemberdayaan Perempuan Rentan Ekonomi dan Sosial (PRSE) telah membantu lebih dari 3.500 perempuan dalam berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan, khususnya pelatihan keterampilan, pinjaman usaha untuk memulai bisnis,

pendampingan ekonomi kewirausahaan, dan institusi kelompok perempuan untuk pemberdayaan yang ditargetkan. Dalam pelaksanaan program ini, pemerintah daerah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta membentuk kemitraan untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, program perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) dikonseptualisasikan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya dan kapasitas penghasil pendapatan perempuan yang rentan secara ekonomi. Kemitraan para pemangku kepentingan diharapkan menyediakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi pemberdayaan perempuan. Namun, sama pentingnya untuk menilai dampak program terhadap pengurangan kemiskinan dan tingkat kesejahteraan perempuan untuk menentukan tingkat keberhasilan.

Sejak beberapa dekade terakhir, konsep pemberdayaan perempuan dalam konteks pengentasan kemiskinan telah menjadi paradigma utama dalam studi pembangunan dan gender. Pemberdayaan perempuan didefinisikan sebagai proses di mana perempuan memperoleh kemampuan untuk membuat keputusan strategis dalam hidupnya, yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan karena berbagai hambatan struktural, menurut Naila Kabeer (2005) (Kabeer, 2005). Menurut Naila Kabeer (1999), pemberdayaan terdiri dari tiga dimensi utama adalah resources (akses terhadap sumber daya material, manusia, dan sosial), agency (kemampuan untuk menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan), dan achievements (hasil atau capaian dari proses pemberdayaan) (Kabeer, 1999). Pemberdayaan perempuan tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan diri, peningkatan kapasitas, pembentukan jaringan sosial, dan peningkatan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam pengentasan kemiskinan. Metode ini sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan kelima tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta tujuan pertama tentang pengentasan kemiskinan.

Dalam program pengentasan kemiskinan, strategi pemberdayaan perempuan memerlukan pendekatan yang tidak hanya melihat hasil ekonomi, tetapi juga

mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, dan struktural yang mempengaruhi keadaan perempuan miskin. Dalam teorinya tentang perencanaan gender, Moser (1993) membedakan antara kebutuhan gender praktis (atau kebutuhan gender praktis) dan kebutuhan gender strategis (atau kebutuhan gender strategis). Pemberdayaan yang benar harus mampu memenuhi kedua kebutuhan tersebut. Kebutuhan praktis terkait dengan kondisi hidup sehari-hari seperti akses air bersih, makanan, dan pendapatan, sedangkan kebutuhan strategis terkait dengan posisi perempuan dalam struktur sosial seperti hak atas tanah, partisipasi politik, dan penghapusan kekerasan berbasis gender (Moser, 1993). Dalam menjalankan program perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) di Kabupaten Sleman, sangat penting untuk memahami bagaimana strategi yang digunakan dapat memenuhi kedua kebutuhan ini agar pemberdayaan yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga transformatif. Rowlands (1997) juga menekankan betapa pentingnya membedakan pemberdayaan dalam tiga tingkat: personal (membangun rasa percaya diri dan kemampuan), relasional (membangun hubungan dan kemampuan bernegosiasi), dan kolektif (perempuan bekerja sama untuk mencapai dampak yang lebih besar) (Pasaribu et al., 2025).

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan), 2025

Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Yogyakarta	34,07	29,68	29,68	28,79	28,58
Sleman	108,93	98,92	97,5	97,96	89,28
Bantul	146,98	130,13	128,51	126,51	127,25
Kulon Progo	81,14	73,21	70,74	71,48	67,25
Gunungkidul	135,33	122,82	122,54	120,41	113,48
Total	9-3,97	454,76	448,77	445,56	425,82

Sumber: BPS D.I Yogyakarta

Urgensi penelitian tentang pemberdayaan perempuan menjadi sangat penting mengingat fakta bahwa, meskipun tingkat kemiskinan di Sleman lebih menduduki posisi nomer tiga dengan angka kemiskinannya, puluhan ribu orang masih hidup

dalam kondisi miskin atau rentan. Selain itu, ini berlaku untuk perempuan yang berasal dari kelompok sosial-ekonomi yang rentan terhadap kemiskinan struktural. Intervensi tanpa data dan analisis yang spesifik terhadap kelompok ini berisiko gagal atau tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana strategi pemberdayaan perempuan bisa diimplementasikan secara efektif dalam konteks lokal Sleman untuk mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian dapat membantu pembuat kebijakan lokal merancang program yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Selain itu, pentingnya penelitian ini terletak pada kemungkinan bahwa itu dapat membantu membangun kebijakan dan praktik pemberdayaan perempuan yang lebih efisien dan berbasis bukti. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk program pemberdayaan perempuan, evaluasi tentang seberapa efektif dan berdampak program tersebut masih sangat sedikit. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022) menyatakan bahwa hanya sekitar tiga puluh persen program pemberdayaan perempuan memiliki sistem pengawasan dan evaluasi yang lengkap. Karena tidak ada evaluasi yang sistematis, sulit untuk menemukan praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diterapkan di daerah lain. Diharapkan penelitian ini akan menghasilkan hasil empiris tentang strategi pemberdayaan yang bekerja dengan baik dalam program perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE). Ini akan menjadi sumber referensi bagi pemerintah daerah, praktisi pembangunan, dan peneliti dalam merancang dan menerapkan program pemberdayaan perempuan yang lebih baik.

Penelitian ini juga akan melihat dimensi keberlanjutan program pemberdayaan karena banyak program yang gagal karena tidak memiliki strategi keberlanjutan yang jelas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Andrea Cornwall and Jenny Edwards, 2010), program pemberdayaan perempuan seringkali bergantung terlalu banyak pada dana eksternal dan juga dapat gagal membangun kapasitas lokal yang cukup untuk melanjutkan program setelah dana habis. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia program pemberdayaan berhasil selama pendanaan dan pendampingan

intensif, tetapi gagal ketika dukungan diberhentikan. Studi ini akan melihat bagaimana strategi pemberdayaan dalam program PRSE di Kabupaten Sleman membangun keberlanjutan, termasuk meningkatkan kemandirian ekonomi peserta, meningkatkan kelembagaan kelompok perempuan, dan membangun jejaring kemitraan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang komponen penting yang diperlukan untuk memastikan bahwa program pemberdayaan perempuan bertahan lama.

Penelitian yang berjudul "Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Program Perempuan Rawan Sosial Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan di Kabupaten Sleman" memiliki relevansi dan urgensi yang telah disebutkan di atas. Diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana strategi pemberdayaan perempuan digunakan dalam program perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE), komponen yang mempengaruhi keberhasilannya, dan dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan perempuan di Kabupaten Sleman. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu mengembangkan model pemberdayaan perempuan yang kontekstual, transformatif, dan berkelanjutan. Model ini dapat diterapkan di Kabupaten Sleman dan di tempat lain dengan karakteristik yang sama. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian tertentu, tetapi juga membantu dalam upaya yang lebih luas untuk mencapai kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan, seperti yang digariskan dalam agenda pembangunan nasional dan global.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah disusun secara sistematis dan analitis untuk mencerminkan urgensi penelitian serta kesenjangan yang masih ada dalam implementasi program tersebut, sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemberdayaan perempuan yang diterapkan dalam program perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) di kabupaten Sleman?

2. Bagaimana dampak pemberdayaan perempuan pada program perempuan rawan sosial ekonomi dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang konkrit, logis, dan spesifik baik dari aspek teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Mengetahui kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan rawan sosial ekonomi di Kabupaten Sleman dalam konteks pengentasan kemiskinan melalui program perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE).
2. Mengidentifikasi dan menganalisis strategi pemberdayaan yang diterapkan dalam program perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) serta mengevaluasi efektivitas strategi tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan rawan sosial ekonomi.
3. Menggali faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan dalam program perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) di Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian sebelumnya, serta penerapan langsung bagi masyarakat, kebijakan, atau sektor terkait. Berikut adalah manfaat penelitian ini:

Manfaat Secara Teoritis:

1. Menyajikan gambaran mendalam terkait bagaimana pemberdayaan perempuan yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang lemah.
2. Memperluas referensi dalam cakupan pemberdayaan sosial dalam pengurangan kemiskinan yang berfokus pada perempuan.
3. Memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemberdayaan perempuan dan program sosial ekonomi, khususnya dalam konteks penurunan kemiskinan.

4. Menambah wawasan dan pemahaman tentang strategi-strategi pemberdayaan perempuan yang efektif dalam mengatasi kemiskinan di tingkat lokal.
5. Menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian sebelumnya terkait pemberdayaan perempuan dan pengembangan program sosial ekonomi di Indonesia maupun daerah lain.
6. Mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan peran perempuan dan strategi pemberdayaan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, serta memperkaya kerangka konseptual dalam bidang studi tersebut.

Manfaat Secara Praktis :

1. Memberikan panduan praktis bagi pemerintah daerah dan lembaga sosial dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pemberdayaan perempuan yang efektif, khususnya bagi perempuan rawan sosial ekonomi di Kabupaten Sleman.
2. Melalui penelitian ini, diharapkan terwujud peningkatan kapasitas dan kemandirian perempuan rawan sosial ekonomi, yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman.
3. Menunjukkan urgensi penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi dan sosial, sehingga memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
4. Membantu organisasi masyarakat untuk memahami strategi pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan rawan sosial ekonomi secara berkelanjutan.
5. Mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarganya melalui program pemberdayaan yang terarah, sehingga berdampak positif pada pengurangan kemiskinan di Kabupaten Sleman.
6. Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berkelanjutan, yang dapat diterapkan oleh pemangku kepentingan secara langsung dan

bersifat jangka panjang untuk mengatasi masalah sosial ekonomi perempuan rawan

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini disusun berdasarkan struktur penelitian yang logis dan kohesif untuk judul "Strategi Pemberdayaan Perempuan Dalam Program Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Untuk Mengurangi Kemiskinan Di Kabupaten Sleman". Struktur terdiri dari lima bab utama, dengan sub-bab yang saling terkait untuk membangun alur dari identifikasi masalah, landasan teori, metodologi, analisis, hingga kesimpulan. Setiap bab dijelaskan secara singkat dengan isi pokoknya.

Bab I: Pendahuluan

Bab ini untuk memberikan gambaran umum dan konteks penelitian, membangun dasar pemahaman masalah. Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah menguraikan konteks dan pentingnya penelitian tentang strategi pemberdayaan perempuan dalam program Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sleman, rumusan masalah tentang mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian tentang menguraikan tujuan penelitian dan kontribusi yang diharapkan, manfaat penelitian tentang menguraikan manfaat teoritis dan praktis penelitian, serta sistematika penulisan dalam skripsi ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas terkait tinjauan pustaka penelitian terkait implementasi strategi, pemberdayaan perempuan, perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE), kemiskinan, serta penyajian definisi konseptual, definisi operasional, uraian penelitian terdahulu, dan terakhir penyusunan kerangka berfikir sebagai dasar alur analisis penelitian.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek atau informan penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data. Bab ini menjadi dasar bagi keabsahan proses penelitian.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan dan menjelaskan temuan penelitian mengenai strategi pemberdayaan perempuan dalam program Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kabupaten Sleman. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan hasil lapangan dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sehingga diperoleh analisis mendalam mengenai efektivitas strategi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab V: Penutup

Berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan untuk peningkatan program pemberdayaan perempuan guna mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sleman.